



**Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji
Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan
*Analytic Network Process***

Abdul Ghofar

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Indonesia
goffarekon@gmail.com

Achmad Firdaus

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Indonesia
achmad.firdaus@tazkia.ac.id

Ronald Rulindo

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Indonesia
rulindoku@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the criteria for investing in Hajj funds and alternative investments that provide benefits to Muslims so that they have an impact on economic growth. By using the Analytic Network Process (ANP) approach, alternative investments offered are Infrastructure, Property, Financial Sector, and Real Sector. Data were collected using a questionnaire consisting of pairwise comparisons between groups and their assessment indicators. A total of 7 (seven) expert speakers (experts) who became respondents successfully collected and processed using the ANP method. The results showed that investment in infrastructure and the real sector provides benefits to Muslims economically, so as to improve the welfare of Muslims which in turn can encourage economic growth.

Keywords: Hajj Funds, Investment, Welfare, Economic Growth.

DOI: 10.22515/jfib.v2i2.1808

Pendahuluan

Pelaksanaan ibadah haji selalu menarik dikaji dari berbagai dimensi baik spiritual, edukatif, sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Sebagai rukun Islam maka ibadah haji termasuk bangunan pokok masyarakat muslim selain Syahadat, Sholat, Puasa, dan Zakat. Karena posisinya yang demikian penting dan strategis maka ibadah haji merupakan peristiwa besar dalam sejarah muslim mulai dari Nabi Ibrahim sampai sekarang. Berhaji terjadi interaksi, saling mengenal dan saling memperkokoh kesatuan dan persatuan sesama muslim di seluruh dunia. Di samping itu, ibadah haji juga bertujuan untuk mendisiplinkan diri manusia dalam perekonomian dan kehidupan sosial.

Dalam perekonomian manusia diajarkan untuk disiplin dalam mengalokasikan pendapatannya untuk belanja spiritual dan disisi kehidupan sosial akan tercipta ukhuwah yang luar biasa antara jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia (Hendri, 2010). Karena tingginya nilai ibadah haji, maka umat Islam Indonesia tidak segan-segan mengorbankan sebagian harta kekayaannya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya selama waktu tertentu dan siap bersusah payah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.

Meningkatnya kemampuan ekonomi Indonesia, jumlah jamaah haji Indonesia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dan bahkan melampaui quota yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensi dan meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen-komponen yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji semakin meningkat, seperti transportasi, pemondokan/penginapan dan katering. Pengadaan komponen ini memiliki nilai ekonomi yang cukup besar sehingga dapat berubah menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan, tidak saja bagi orang Indonesia tapi juga bagi orang Arab Saudi (Basyuni, 2004).

Melihat betapa besarnya manfaat ekonomi bagi umat dari haji ini, Al Qur'an lebih dari lima belas abad yang lalu telah memberikan isyarat yang jelas bahwa kita harus menjadikan haji sebagai kekuatan ganda: (i) spiritual dan (ii) material. Betapa besarnya potensi ekonomi yang terdapat dalam haji tetapi sayang kaum muslimin hanya menjadi pangsa pasar alias konsumen tetapi sangat sedikit perannya sebagai produsen dan pemberi *value added*. Ada belasan sektor industri yang terlibat dalam “muktamar internasional tahunan umat Islam” itu. Di antara sektor yang terkait dengan perjalanan haji adalah (Muhammad Syafi'i, 2011).

Malaysia dapat dijadikan pembanding untuk pengelolaan kinerja pengelolaan dana haji Indonesia. Pengelolaan dana haji sejak 1963 dilakukan secara terpusat, produktif, *prudent* dan sesuai syariah oleh Tabung Haji (TH). TH adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penyelenggaraan haji Malaysia secara terintegrasi, yaitu (i) menyediakan layanan tabungan haji bebas bunga untuk setiap muslim Malaysia; (ii) melakukan investasi dana haji yang terkumpul secara prudent dan sesuai syariah; dan (iii) menyelenggarakan pelayanan sebelum, selama, dan setelah ibadah haji.

Memonopoli pengelolaan haji, skala bisnis TH menjadi besar, sehingga terjadi efisiensi dalam belanja dan pengadaan terkait penyelenggaraan haji (*economies of scale*). Disaat yang sama, dengan monopoli dari hulu hingga hilir TH juga mencapai *economies of scope*, karena pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan haji menjadi lebih efisien ketika dilakukan oleh satu lembaga. Di Malaysia, semua muslim dewasa dapat membuka rekening tabungan haji, dan bahkan juga anak-anak.

Sistem tabungan haji di muka, TH dapat mengelola dana jangka panjang yang murah untuk investasi di berbagai sektor perekonomian, dengan tetap menjadikan return keuangan dan kehati-hatian investasi sebagai

acuan utama. Karena itu TH tetap mampu memberikan *return* yang kompetitif kepada nasabah penabung dalam bentuk bonus tahunan. Tabung Haji yang hanya mengelola dana haji 25 ribu jamaah per tahunnya dengan biaya sekitar RM 9 ribu (Rp.26.640.000,-) per jamaah, pada tahun 2016 memiliki aset RM.64,3 milyar (Rp.192,7 trilyun) dan mampu meraih laba RM.2,5 milyar (Rp.7,4 trilyun). Pembayaran biaya haji secara terpusat dengan sistem tabungan dimuka, memungkinkan TH mengelola dana haji dari 9,1 juta nasabah secara produktif pada sektor usaha yang aman dan sesuai syariah. Selain investasi di pasar modal, TH terlibat secara aktif dalam berbagai investasi disektor riil, dari mendirikan bank syariah hingga memiliki perkebunan kelapa sawit (Yusuf, 2017).

Biaya penyelenggaraan haji yang lebih murah karena skala bisnis dari jamaah haji Indonesia yang sangat besar. Dengan kuota haji lebih dari 220 ribu, jamaah Indonesia merupakan 11 persen dari total jamaah haji dunia setiap tahunnya. Selain dari tercapainya skala ekonomi (*economies of scale*), biaya yang lebih murah juga didapat dari posisi tawar penyelenggaraan haji Indonesia yang sangat tinggi dalam berhadapan dengan pemasok-pemasok kebutuhan haji seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi.

Peminat haji yang begitu besar dan panjangnya antrian haji, akumulasi setoran dana awal calon jamaah haji dapat digunakan secara produktif di mana hasilnya dikembalikan kepada jamaah haji untuk peningkatan pelayanan haji. Antrian calon jamaah haji kini tercatat telah mencapai 3-4 juta orang, dengan masa tunggu terlama hingga 30 tahun. Akumulasi dana setoran awal jamaah kini mencapai 97 trilyun. Pengelolaan dana haji ke depan secara produktif pada sektor usaha yang aman disektor riil dan sesuai syariah, tidak boleh lagi terbatas pada instrumen keuangan yang minim dampaknya pada sektor riil dan ekonomi umat (Yusuf W., dkk., ekonomi haji, republika 14/09/2017).

Dari permasalahan tersebut di atas, pertanyaan yang muncul adalah Apa saja kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan investasi dana haji? Dan Apa saja alternatif investasi dana haji yang sebaiknya dipilih yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada umat Islam sehingga mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian mengenai pembiayaan haji ini setidaknya pernah di kaji oleh Mannan (2013), salah satu kesimpulan penelitian ini adalah bahwa adanya peran haji untuk perencanaan pembangunan Negara-Negara Muslim. (*Journal of Islamic research and training institute Islamic Dev. Bank*, hlm.9). Selain itu, Bhima Yudhistira (2017) menyarankan pemerintah Indonesia mencontoh Malaysia dalam hal pengelolaan dana haji untuk pembangunan. Akan tetapi menurut dia, yang perlu dicatat Tabung Haji Malaysia tidak membangun infrastruktur tetapi membangun konstruksi atau real estate dengan imbal hasil yang tinggi.

Nazri (2015) menyebutkan bahwa perlu adanya Bank Haji Indonesia (BHI) yang secara khusus fokus pada pengelolaan keuangan haji (setoran awal, investasi, dan lain-lain). Jika hal ini dapat diimplementasikan, maka kedepannya manajemen pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan lebih baik.. Selain itu, Alfiyanti (2016), dalam salah satu kesimpulannya menyatakan faktor koordinasi antar pemangku kebijakan. Kementerian Agama harus bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan dana haji sebagai sukuk. Sementara Kementerian Agama juga harus menjaga hubungan yang baik dengan BPS dalam rangka penempatan dana haji ke dalam deposito. Koordinasi antara para pemangku kebijakan harus dilakukan secara intensif.

Penelitian Shuhaimi Bin Haji Ishak dengan judul “*Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development*” penelitian yang dihasilkan adalah bahwa model tabung haji dalam lembaga keuangan Islam dapat dijadikan alternatif untuk pembangunan ekonomi, (Moh. Shuhaimi Bin Haji Ishak, “*Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic*

Development”), *Journal of Historical and Social sciences IPEDR* vol.17, 2011 hal.236-240.

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang mengkaji kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan investasi dana haji? Dan Apa saja alternatif investasi dana haji yang sebaiknya dipilih yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi kepada umat Islam di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk dilakukan guna meningkatkan kemanfaatan dana haji di Indonesia.

Metode Penelitian

Analytic Network Process (ANP) adalah teori umum pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol (Saaty, 2003). ANP merupakan teori matematika yang memungkinkan seseorang untuk memperlakukan *dependence* dan *feedback* secara sistematis yang dapat menangkap dan mengkombinasi faktor-faktor *tangible* dan *intangible* (Iwan J, 2003).

ANP sebagai pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar.

ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedback* nya secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP

yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical. Struktur jaringan yang digunakan yaitu *benefit, opportunities, cost and risk* (BOCR) membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyusun semua faktor yang mempengaruhi output atau keputusan yang dihasilkan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian menggunakan metodologi ANP dengan melakukan dekomposisi masalah yakni mengurai masalah dari beragam sumber menjadi satu kesatuan dalam bentuk bagan/kerangka/model ANP (Ascarya, 2005). Dekomposisi masalah selain melalui kajian pustaka juga diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para pakar dan praktisi yang memahami betul masalah yang diangkat pada penelitian ini. Para pakar yang dipilih dalam konstruksi model berikut pengisian kuesioner ANP ini terdiri dari 7 (tujuh) orang narasumber. Dari tujuh orang narasumber terdiri atas 3 (tiga) orang berlatar belakang pejabat pemerintah (Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), dua orang dari unsur praktisi investasi, dan dua orang dari unsur akademisi.

Berdasarkan kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan para pakar dan responden yang masing-masing mewakili kalangan pemerintah (regulator), praktisi, dan akademisi di atas, dan hasil review pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal maka terbentuk sebuah model penelitian. Sesuai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kajian beberapa literatur dan *indepth interview* pada pakar ihwal analisis Investasi Dana Haji dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi, *cluster* dapat dibagi menjadi beberapa bagian yakni mencakup: tujuan, kriteria, subkriteria *return*, subkriteria resiko,

subkriteria *beneficiary*, dan subkriteria *time horizon* (jangka waktu), berikut alternatif.

Setiap masing-masing responden memiliki pendapat yang berbeda-beda, oleh sebab itulah hasil olah ANP dalam *software super decision* menyajikan hasil perolehan konklusi berdasarkan nilai rata-rata untuk menentukan urutan prioritas secara keseluruhan dan hasil sintesis untuk masing-masing responden berdasarkan kategori yang ada. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan diuraikan bagaimana hasil sintesis dari setiap kriteria dan alternatif dalam proses *Analytic Network Process*. Pada tahapan ini akan menunjukkan hasil keseluruhan *geomean (geometric mean)* juga tingkat *rater agreement* (kesesuaian/persetujuan) dengan menggunakan ukuran *Kendall's coefficient of concordance (W)*. (Thomas L, Saaty, 2001).

Tujuan yang ditentukan pada penelitian, yaitu investasi dana haji dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Investor mempunyai kriteria-kriteria dalam menginvestasikan dananya, demikian juga kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam melakukan investasi dana haji. Selanjutnya, diantara kriteria yang ada, alternatif investasi apa yang memberikan manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia sehingga mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dekomposisi

Sesuai UU No.34 Tahun 2014 (pasal 2) bahwa pengelolaan keuangan haji berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat nirlaba, transparan dan akuntabel. Proses dekomposisi dalam penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dan melalui *indepth interview* dengan para informan terpilih, Dari hasil ini, terdapat beberapa kriteria dalam menginvestasikan dana haji. Secara garis besar masalah tersebut dibagi menjadi empat kriteria, yaitu; kriteria *Return* atau tingkat pengembalian, kriteria resiko (*risk*), kriteria *beneficiary* atau

penerima manfaat, dan kriteria *time horizon* atau jangka waktu. Sementara itu, alternatif ada empat yakni: alternatif investasi untuk infrastruktur, untuk properti, untuk sektor keuangan dan investasi pada sektor riil. Adapun sebagai *goal* (tujuan) adalah investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. (UU.No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 1). Nilai dana haji per April tahun 2018 adalah sebesar Rp.109,2 trilyun. Anggito (2018) disampaikan saat seminar nasional “Pembiayaan Pembangunan Infrastuktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi: Dana Haji Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Nasional”, tanggal 9 Mei 2018 di Aula DJPK Kementerian Keuangan).

Kriteria *Return* (Pengembalian)

Return adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal atau dana investasi (Didit, 2013). Tingkat pengembalian (*return*) merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Dalam penelitian ini, kriteria *return* bagi ke dalam 3 jenis yakni *low return*, *medium return* dan *high return*. *Low Return* dengan klasifikasi antara 1 sampai dengan 5 %, *Medium Return* dengan klasifikasi lebih besar dari 5 sampai dengan 15 % dan *High Return* dengan klasifikasi di atas 15%.

Kriteria *Risk* (Resiko)

Risk (risiko) adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan (Haymas Adler, 2003). Seperti halnya *return*, kriteria *risk* dibagi menjadi 3

yakni *high risk*, *medium risk* dan *low risk*. *High risk*, yakni investasi dengan tingkat risiko yang tinggi. *Risk Taker*, memahami bahwa untuk mengharapkan hasil investasi yang tinggi harus menghadapi risiko yang tinggi pula. Sementara itu *Medium risk*, adalah investasi dengan tingkat risiko yang sedang. *Risk Neutral*, menginginkan hasil investasi yang lebih tinggi, dengan tingkat risiko yang sedang. Adapun *Low risk*, yakni investasi dengan tingkat risiko yang rendah. *Risk Averse*, cenderung menghindari risiko investasi tetapi mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi dari besarnya investasi yang dihadapi.

Kriteria *Beneficiaries*

Beneficiary adalah penerima manfaat langsung atas penempatan investasi dana haji. Kriteria ini dibagi menjadi 3 kelompok yakni: *Many*, *medium* dan *few*. *Many Beneficiaries*, dimana penerima manfaat langsung atas penempatan investasi dana haji dirasakan oleh masyarakat luas. *Medium Beneficiary*, penerima manfaat langsung atas investasi dana haji hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat. Adapun *Few Beneficiary*, penerima manfaat langsung atas investasi dana haji hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan keuangan haji adalah “manfaat”, artinya pengelolaan keuangan haji harus dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Kriteria *Time Horizon*

Time Horizon, adalah jangka waktu investasi dikaitkan dengan tujuan investasi. Bagian ini juga dibagi ke dalam tiga bagian yakni: *long term*, *medium term* dan *short term*. *Long Term* dengan klasifikasi di atas 5 (lima) tahun. *Medium Term* dengan klasifikasi 1 samapi dengan 5 tahun, dan *Short Term*, dengan klasifikasi jangka waktu investasi kurang dari 1 tahun (Didit, 2013).

Sementara itu, dari sisi alternatif penempatan investasi dana haji, dibagi ke dalam 4 (empat) alternatif, yakni: alternatif investasi untuk infrastruktur pernah disampaikan oleh Presiden saat sambutan pada pelantikan anggota BPKH, untuk properti, investasi untuk sektor keuangan dan investasi pada sektor riil.

Masuk di dalam alternatif infrastruktur adalah pembiayaan untuk jalan tol, bandar udara dan pelabuhan. Untuk alternatif properti, masuk di dalamnya adalah Apartemen, Hotel di Mekkah atau Madinah, dan Asrama Haji di Indonesia. Sementara itu, untuk alternatif sektor keuangan, masuk di dalamnya adalah giro, tabungan, deposito bank syariah dan surat berharga pasar modal syariah. Adapun untuk alternatif sektor riil, masuk di dalamnya investasi untuk Industri, UMKM, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Pairwise Comparison

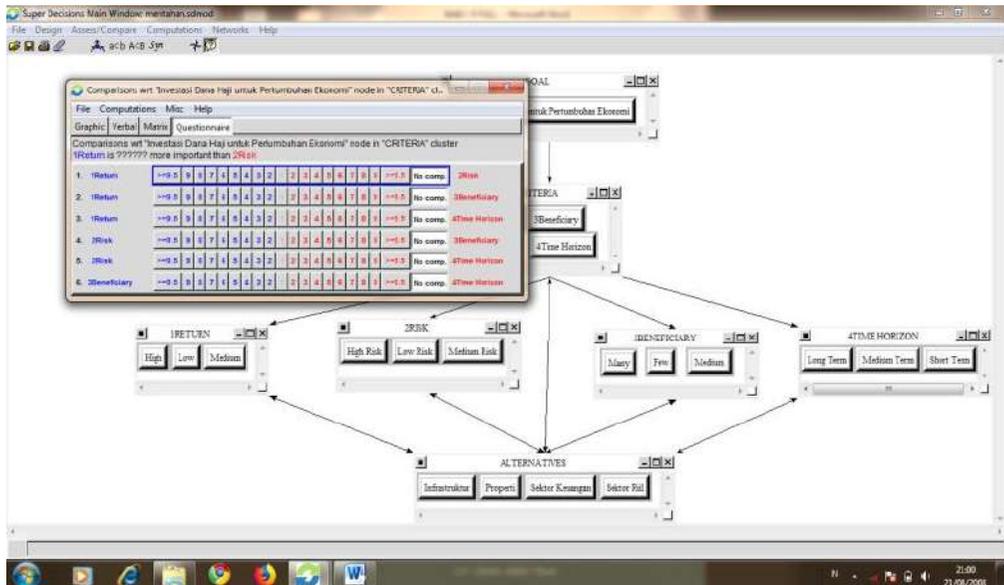
Setelah model/kerangka konseptual diperoleh melalui *indepth interview* dengan bertemu para pakar, baik dari pihak regulator, akademisi maupun praktisi, selanjutnya, setelah hasil informasi terkumpul dan tersusun dalam bentuk kuesioner perbandingan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner kepada 7 (tujuh) orang pakar yang dianggap kompeten dalam kerangka analisis investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketujuh pakar tersebut berasal dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, akademisi dan praktisi investasi.

Sebagai kemudahan bagi penulis dalam memperoleh hasil kuesioner dengan jumlah pertanyaan serta untuk menjaga tingkat konsistensi, maka penulis menggunakan model kuesioner perbandingan sesuai dengan model yang telah dimodifikasi (Ascarya, 2005) dalam bentuk tabel. Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 4.1. Untuk menjawab pertanyaan, tabel

dilengkapi pula dengan deskripsi skala/rating yang akan digunakan serta responden diberikan lampiran jaringan ANP yang telah disusun.

Gambar 4.1

Kuesioner Perbandingan Dalam *Super Decision*



Sintesis dan Analisis

Hasil survei yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner diolah terlebih dahulu untuk setiap masing-masing responden dengan menggunakan kerangka ANP untuk analisis investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Model kerangka tersebut juga menjadi landasan dalam pembuatan kuesioner. Data yang diolah dari masing-masing responden tersebut menghasilkan dua matriks yang akan memberikan urutan prioritas kriteria, dan alternatif yang tepat menurut pendapat masing-masing responden.

Dalam penelitian ini terdapat 7 (tujuh) responden/narasumber di mana setiap masing-masing responden memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah, hasil olah ANP dalam software *super decision*

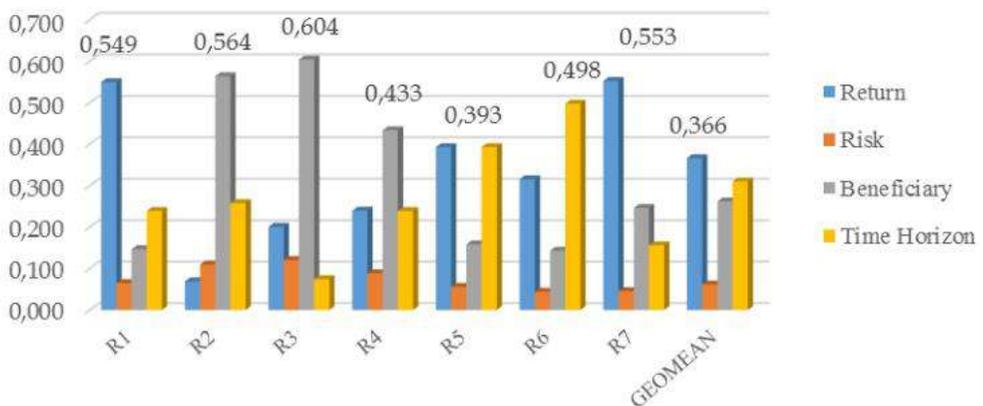
menyajikan hasil perolehan konklusi berdasarkan nilai rata-rata untuk menentukan urutan prioritas secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan bagaimana hasil sintesis dari setiap kriteria dan alternatif dalam proses ANP. Pada tahapan ini akan menunjukkan hasil keseluruhan dan sintesis rata-rata responden dari 7 (tujuh) orang pakar terhadap masing-masing *cluster*.

Analisis Kriteria dan Subkriteria

Pada pembahasan ini akan dijawab pertanyaan penelitian pertama mengenai prioritas kriteria investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas setiap kriteria dari pendapat para pakar sebagaimana Gambar 4.2.

Gambar 4.2

Hasil Sintesis Kriteria Berdasarkan Nilai Rata-Rata



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa *cluster* kriteria terbagi menjadi empat aspek yaitu kriteria *return*, *risk*, *beneficiary* dan *time horizon*. Penelitian menunjukkan perolehan hasil rata-rata sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.4. menunjukkan bahwa kriteria *return* merupakan kriteria yang memiliki tingkat prioritas tertinggi yaitu sebesar 36,60%, diikuti oleh kriteria *time horizon* 31,00%, kriteria *beneficiary* 26,20% dan terakhir adalah kriteria *risk* yaitu

sebesar 6,20%. Perolehan hasil *rater agreement* menunjukkan bahwa 11,11% responden setuju/sepakat bahwa kriteria *return* merupakan kriteria yang paling prioritas, lalu diikuti oleh kriteria *time horizon*, *beneficiary* dan *risk*. Nilai 11,11% menunjukan tingkat persetujuan yang lemah (*weak agreement*). Rendahnya angka *rater agreement* dimungkinkan oleh perbedaan latar belakang para responden. Sebagian besar responden sepakat bahwa dalam berinvestasi kriteria yang terpenting adalah *return*, namun ada responden yang lebih memprioritaskan dalam menginvestasikan dana haji adalah kriteria *time horizon* dan manfaat (*beneficiary*). Berikut kesimpulan hasil sintesis kriteria investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Hasil Sintesis Gabungan, *Ranking* Dan *Rater Agreement* Kriteria

Masalah	Hasil Sintesis		Nilai W
	Mean	Rank	
Return	0.366	1	0.11
Risk	0.062	4	
Beneficiary	0.262	3	
Time Horizon	0.310	2	

Sumber : wawancara, data diolah.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perolehan sintesis berdasarkan nilai rata-rata pendapat gabungan dari keseluruhan responden terkait dengan kriteria. Nilai Rank menunjukkan peringkat (*ranking*) prioritas masalah, sedangkan W menunjukkan hasil *rater agreement* (tingkat persetujuan) antar responden.

Tingkat pengembalian (*return*) merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Hartono, mengatakan bahwa “Dalam konteks investasi, harapan keuntungan sering

disebut sebagai *return*. Seorang investor mengharapkan *return* yang tinggi dari investasi yang dilakukannya. Namun untuk mengharapkan *return* yang tinggi, investor menghadapi risiko yang tinggi pula”.

Cluster subkriteria aspek *return* menunjukkan bahwa pendapat gabungan responden menjadikan masalah paling prioritas adalah *high return* (46,20%), kemudian diikuti oleh *medium return* (38,80%), dan *low return* (15,10%). Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono (2003) bahwa *return* merupakan faktor utama dalam berinvestasi. Aspek investasi BPKH harus memperhatikan aspek imbal hasil (*return*) dalam suatu investasi (Adiwarman, 2017). Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tidak menekankan aspek *return*.

Investasi keuangan haji dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (PP. No.5 Tahun 2018, pasal 26). Untuk subkriteria aspek *Risk* menunjukkan bahwa pendapat gabungan responden yang menjadi masalah paling penting adalah *medium risk* (40,70%), kemudian diikuti oleh *low risk* (33,40%), dan *high risk* (25,90%). Hal ini menunjukkan bahwa bahwa responden sepakat bahwa untuk investasi dana haji menghindari risiko yang tinggi (*high risk*). Mitigasi risiko dalam investasi menjadi bagian *maqasid syariah* (tujuan yang ingin dicapai dalam syariah) , yaitu menjaga harta, *hifdzul mal min janib-al wujud* (Oni, 2018). Pengeluaran investasi keuangan haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko, yang dilakukan dengan cara antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan investasi yaitu menambahkan unsur proteksi atau penjaminan (PP. No.5 Tahun 2018, pasal 26).

Subkriteria aspek *Beneficiary* menunjukkan bahwa pendapat gabungan responden yang menjadi masalah paling prioritas adalah *many beneficiary* (47,40%), kemudian diikuti oleh *medium beneficiary* (39,20%), dan *few beneficiary*

(13,30%). Hal ini sejalan dengan UU No.34 Tahun 2014 pasal 2, “Pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan manfaat, yaitu harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi jemaah haji dan umat Islam”. Dana haji jangan sampai menumpuk dan hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang bisa mengakses perbankan saja, karena bertentangan dengan prinsip syariah yaitu uang tidak boleh berputar hanya dikalangan orang-orang tertentu saja (Adiwarman, 2017). Subkriteria terakhir aspek *time horizon* menunjukkan bahwa pendapat gabungan responden yang menjadi masalah paling prioritas adalah *long term* (37,20%), kemudian diikuti oleh *medium term* (36,80%), dan *short term* (26,10%).

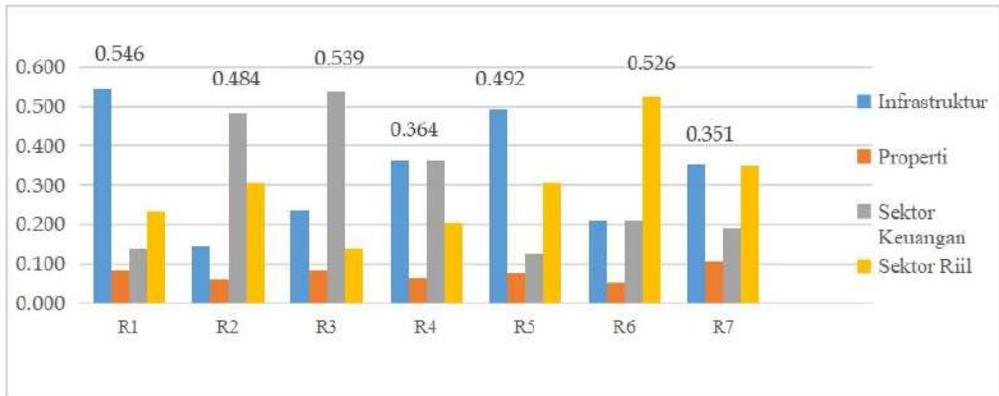
Pengelolaan dana haji harus memperhatikan aspek *liquid* (cair) yang dimaksud yaitu untuk persiapan dana penyelenggaraan haji selama 3 (tiga) tahun. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah merasa tenang dan nyaman untuk penyelenggaraan ibadah haji selama 3 tahun. Jika diasumsikan biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun sebesar 10 trilyun, maka dana haji yang disiapkan adalah 30 trilyun (Adiwarman, 2017). BPKH wajib menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya penyelenggaraan ibadah haji pada setiap musim haji tahun berjalan (PP.No.5 Tahun 2018 pasal 20).

Analisis Alternatif

Selanjutnya pembahasan menjawab pertanyaan penelitian mengenai prioritas alternatif investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas setiap alternatif dari pendapat para pakar sebagaimana tampak pada gambar 4.3.

Gambar 4.3.

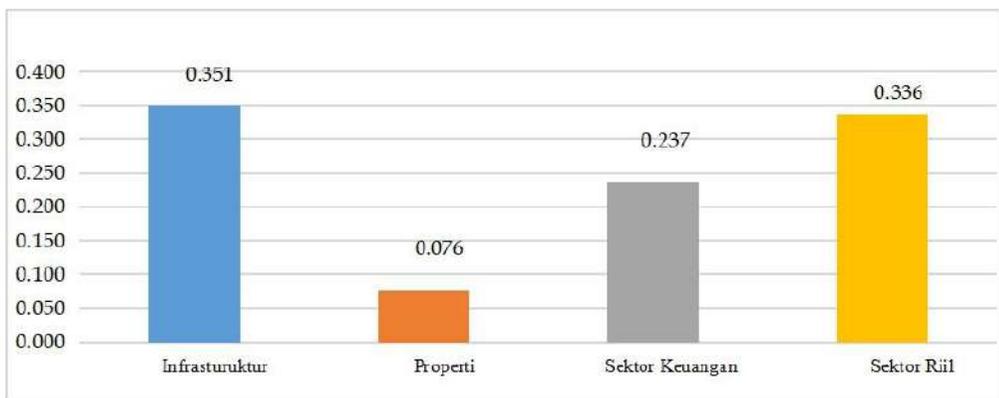
Hasil Sintesis Alternatif



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa masing-masing responden/narasumber memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan keahliannya. Dari 7 (tujuh) responden 4 pakar menyatakan bahwa prioritas paling penting adalah investasi dalam bentuk infrastruktur, 2 (dua) responden menyatakan bahwa prioritas paling penting adalah investasi dalam sektor keuangan, dan 1 (satu) responden menyatakan bahwa sektor riil merupakan yang paling prioritas. Sedangkan sektor properti 7 (tujuh) responden sepakat bahwa investasi dana haji untuk properti tidak prioritas.

Hasil pengolahan data pendapat gabungan dari para pakar sebagaimana tampak pada gambar 4.4.

Gambar 4.4



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa menurut hasil jawaban keseluruhan responden berdasarkan perolehan hasil rata-rata bahwa alternatif *infrastruktur* merupakan alternatif yang memiliki tingkat prioritas tertinggi yaitu sebesar 35,10%, diikuti oleh alternatif *investasi sektor riil* 33,60%, alternatif *sektor keuangan* 23,70% dan terakhir adalah alternatif untuk investasi pada *properti* yaitu sebesar 7,60%. Perolehan hasil *rater agreement* menunjukkan bahwa 48,17% responden setuju/sepakat bahwa investasi terhadap *infrastruktur* merupakan alternatif yang paling prioritas, lalu diikuti oleh alternatif investasi pada sektor riil, sektor keuangan dan properti. Rater agreement dengan nilai 48,17% menunjukkan tingkat persetujuan yang moderat (*moderate agreement*) diantara para responden dengan latar belakang yang beragam. Hasil sintesis alternatif investasi dana haji dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Hasil Sintesis Gabungan, *Ranking* Dan *Rater Agreement* Alternatif

Masalah	Hasil Sintesis		Nilai W
	Mean	Rank	
Infrastruktur	0.351	1	0.48
Properti	0.076	4	
Sektor Keuangan	0.237	3	
Sektor Riil	0.336	2	

Sumber : wawancara, data diolah.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil perolehan sintesis berdasarkan nilai rata-rata pendapat gabungan dari keseluruhan responden terkait dengan alternatif. Nilai Rank menunjukkan peringkat (*ranking*) prioritas masalah, sedangkan “W” menunjukkan hasil *rater agreement* (tingkat persetujuan) antar responden. Berdasarkan pengolahan data tersebut Dari 7 (tujuh) responden, sebagian

besar responden menempatkan investasi dana haji pada infrastruktur merupakan prioritas, yang memang sekarang pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Ada satu responden berpendapat bahwa investasi dana haji agar memberikan manfaat secara ekonomi lebih besar dirasakan umat Islam sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan maka ditempatkan pada sektor riil. (Sani, 2018, wawancara).

Pembangunan proyek-preyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam laporan Semester II Tahun 2017 terkait dampak penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pemerintah (KPPIP) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) untuk mengukur besaran dampak positif tersebut dengan menggunakan indikator utama perekonomian seperti PDB, tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga. Secara nasional, pembangunan infrastruktur Prioritas Strategis Nasional (PSN) memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Besaran dampak yang terjadi berbeda-beda tergantung pada besaran alokasi dan investasi sektoral.

Secara umum pembangunan PSN yang sebagian kebutuhan investasinya dibiayai melalui pengalihan subsidi, berpotensi meningkatkan PDB sebesar 5,32%. (laporan KPPIP Semester II, Juli-Desember 2017). Muhammad Syafi'i (2011), menjelaskan bahwa ada belasan sektor industri yang terlibat dalam ibadah haji yang merupakan "muktamar internasional tahunan umat Islam", antara lain sektor transportasi baik udara, laut maupun darat, tours and travel, garmen, food and beverages, telekomunikasi, perhotelan, dan lain-lain. Setiap tahunnya sekitar 3 (tiga) juta muslim melakukan haji dari seluruh penjuru dunia. Transaksi ekonomi yang terjadi sangat besar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, diperoleh kesimpulan bahwa dana haji yang cukup besar (Rp.109,2 trilyun) dan tiap tahun meningkat harus dikelola dengan memperhatikan aspek syariah, imbal hasil (*return*), likuiditas, risiko, dan manfaat. Dana haji jangan menumpuk dan hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang bisa mengakses perbankan saja, harus dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam. Program investasi dana haji oleh BPKH dalam bentuk investasi surat berharga syariah, SDHI, investasi langsung di Arab Saudi, juga investasi langsung atau kerjasama dengan pemerintah/BUMN, dan investasi lainnya kontrak jangka panjang. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, harus merasakan manfaat atas pengelolaan dana haji sehingga meningkatkan kesejahteraan dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi pula dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*growth with equity*). Kondisi fiskal yang terbatas ditandai dengan defisitnya APBN, tentu dibutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, G. (2010). *Keuangan Syari'ah, Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Anggito, A. (2018). *Pengelolaan Keuangan Haji dan Program Investasi BPKH* "Seminar Nasional Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi: Dana Haji Sebagai Salah Satu

- Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional”, Aula DJPK, Kemenkeu, 9 Mei 2018, Jakarta.
- Ar-Rifa'i, M. N. (1999). *Tafsir Ibnu Katsir Ringkasan, kemudaban dari Allah, Penerjemah Syihabuddin*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2005). “*Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif*”. Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
- Basyuni, M. M. (2004). *Pokok-Pokok Perbaikan Pelaksanaan Haji Tabun 2005 dan Hubungan dengan Arab Saudi, disampaikan pada acara Lokakarya Nasional Penyelenggaraan Haji Tabun 2004*. Mediacita.
- Didit, H. (2013). *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Goysen Publishing.
- Haymas Adler, M. (2003). *Memahami Seluk Beluk Instrumen Investasi*. Adler Manurung Press.
- Hendri, T. (2010). Hikmah Ibadah Haji Terhadap Ekonomi. *Journal Ekonomi Islam Al-Infraq Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, 1(1)*.
- Iwan J, A. (2003). *Analytic Network Process with Feedback Influence: A New Approach to Impact Study, mimeo, paper presented in seminar organized by the Department of Urban and Regional Planning*. University of Iullinois.
- Karim, Adiwarmen. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kemashabatan Umat*, disampaikan pada Seminar Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah, tanggal 29 November 2017, Jakarta.
- M. Dawam, R. (2004). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Haji: Perlu Dipikirkan “Tabung Haji Indonesia.”*
- Metwally. (1995). *Teori dan Model ekonomi Islam* (B. D. I. Husein Sawit (ed.)). Bangkit Daya Insana.
- Muhammad Syafi'i, A. (2011). *Economy of Haji: The Neglected Fortune*. Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia.
- N Gregory, M. (2006). *Principles Of Economics, Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Oni, S. (2018). *Investasi Dana Haji, Konsultasi Syariah*. Republika.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Haji*.

Rahardjo, M.Dawam. (2004). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Haji: Perlu Dipikirkan “Tabung Haji Indonesia”, disampaikan pada acara Lokakarya Nasional Penyelenggaraan Haji Tahun 2004, Mediacita Jakarta.

Thomas L, Saaty. (2001). *Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process*. RWS Publication.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*.

Yusuf, W. (2017). *Ekonomi Haji*. Republika.